

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DI KABUPATEN MERAUKE**

**Mulyana<sup>1</sup> dan Christian Jhonfri Tambunan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, <sup>2</sup>Pemerintah Kabupaten Merauke

Email: mulyana@ipdn.ac.id; christianjhonfri@gmail.com

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke dari tahun 2015 hingga 2020 dengan upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah berjalan baik atau belum sebagai pihak dari Pemerintah Daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat. Analisis permasalahan tersebut digunakan teori partisipasi politik menurut James Roseau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah Wawancara dan Dokumentasi. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Penulis menyimpulkan bahwa perkembangan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Merauke pada pilkada Tahun 2015 hingga 2020 mengalami kenaikan sebesar 14,66%, peningkatan ini terjadi karena masyarakat Kabupaten Merauke mulai memiliki kesadaran berpartisipasi politik dengan gaya partisipasi yang aktif dimana masyarakat cenderung berpartisipasi karena faktor derita yang dialami. Gaya partisipasi masyarakat cenderung memiliki tipe langsung, tidak kentara, secara tersembunyi, secara acak dan sistematis. Penulis merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan media massa yang ada seperti siaran radio lokal, televisi lokal dan pemanfaatan media sosial yang ada saat ini. Perlu adanya kerjasama antara pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan KPU, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, hingga RT dan RW untuk menumbuhkan budaya politik dalam diri masyarakat. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Partai Politik sebagai infrastruktur politik untuk menjalankan fungsinya dalam masyarakat dan Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam penyampaian aspirasi melalui kerjasama dengan pihak Pemerintah Distrik.

**Kata Kunci:** Partisipasi Politik; Pendidikan Politik; Pemilihan Kepala Daerah

***COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN THE ELECTIONS OF  
HEAD REGION BY THE AGENCY OF NATION AND POLITICAL UNITY  
IN THE MERAUKE REGENCY***

**ABSTRACT.** *This study aims to analyze the development of community participation in the election of the Regent and Deputy Regent in Merauke Regency from 2015 to 2020 with the efforts made by the National Unity and Politics Agency that has been going well or not as a party from the Regional Government in encouraging community participation. Analysis of these problems used the theory of political participation according to James Roseau. The research method used is descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used in the study were interviews and documentation. The steps used in data analysis are data reduction, data verification and drawing conclusions. The author concludes that the development of the political participation of the people of Merauke Regency in the 2015 to 2020 elections has increased by 14.66%, this increase occurs because the people of Merauke Regency have started to have awareness of participating in politics with an active participation style where people tend to participate because of the suffering factor they experience. The style of community participation tends to be direct, subtle, hidden, random and systematic. The author recommends that the National Unity and Politics Agency can conduct socialization to the community using existing mass media such as local radio broadcasts, local television and the use of existing social media. There is a need for cooperation between the National and Political Unity Agency and the KPU, District Government, Village Government, to RT and RW to foster a political culture within the community. Provide guidance and direction to Political Parties as political infrastructure to carry out their functions in society and Supervise and guide the community in conveying aspirations through collaboration with the District Government.*

**Keywords:** Political Participation; Political Education; Regional Head Election

DOI: <https://10.33701/jiwbp.v11i2.2259>

Terbit Tanggal 29 Oktober 2021

**PENDAHULUAN**

Partisipasi Politik sebagai suatu syarat pokok yang harus dilakukan masyarakat di dalam negara demokrasi. Dan juga sebagai ciri khas terdapatnya modernisasi politik di dalamnya. Partisipasi politik sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat agar terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi politik ini merupakan bagian penting dan suatu keharusan bagi masyarakat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan, untuk turut dalam proses demokrasi. Kebebasan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya sebagai bentuk partisipasi politik memberikan peluang bagi para partai politik di daerah untuk berlomba-lomba menempatkan kader-kader terbaiknya. Dalam mengikuti proses pemilihan kepala daerah sebagai usaha memperebutkan kekuasaan di daerah. Hal ini pada akhirnya membuat masyarakat menghadapi berbagai pilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengusung visi-misi dari masing-masing calon. Dengan tujuan untuk memperoleh dukungan sebanyak mungkin dari masyarakat. Para calon kepala daerah ini pun menampilkan berbagai latar belakang yang dimiliki mereka baik dari sisi pendidikan ataupun pengalaman berkarir di bidang politik dan non-politiknya. Dengan harapan agar masyarakat percaya akan visi dan misi yang dijanjikan akan terlaksana.

Partisipasi Politik di Papua sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi masyarakat disana. Dikarenakan semenjak

bergabungnya Papua dengan Indonesia sendiri, dilakukan pemungutan pendapat rakyat atau dikenal dengan istilah pepera yang diadakan pada tanggal 2 Agustus 1969. Dengan adanya peristiwa ini menandakan bahwa masyarakat Papua sejatinya sudah melakukan partisipasi politik mereka pada permasalahan politik yang terjadi di masa itu. Setelah bergabung dengan Indonesia Papua sendiri mendapatkan desentralisasi untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri sebagai pemerintah daerah. Dengan terbentuknya Pemerintah Daerah Provinsi Papua ini maka diperlukan pemimpin untuk memimpin daerah ini. Dalam pemilihan pemimpin daerah, Provinsi Papua turut melaksanakan pemilihan kepala daerah melalui sistem pemilihan umum dan ikut berpartisipasi juga di dalam pemilihan presiden.

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Provinsi Papua sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.435.430 Jiwa pada Tahun 2020. Dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir Provinsi Papua telah melaksanakan pemilihan kepala daerah baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Tahun 2018 maupun pemilihan bupati dan wakil bupati yang dilakukan secara serentak pada Tahun 2015. Pada Tahun 2018 dilakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode 2018-2022 yang diikuti oleh pasangan calon Lukas Enembe - Klemen Tinal dan Jhon Wempi Wetipo - Habel Melkias Suwae. Dengan perolehan sebagai berikut:

**Tabel 1. Pilkada Gubernur Papua Periode 2018-2022**

No.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara	Persentase Suara
1.	Lukas Enembe - Klemen Tinal	831.032	62,52%
2.	Jhon Wempi Wetipo - Habel Melkias Suwae	498.195	37,48%
Jumlah Pengguna Hak Pilih		1.329.226	
Jumlah Daftar Pemilih Tetap		1.486.752	

Sumber: infopemilu.kpu.go.id

Pesta demokrasi tersebut dimenangkan oleh pasangan calon Lukas Enembe - Klemen Tinal. Dengan perolehan suara sebesar 62,52% di seluruh Provinsi Papua. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pengguna hak pilih tergolong banyak dengan

jumlah 1.329.226 orang yang berpartisipasi, dan hanya 157.526 orang yang tidak memilih atau menggunakan hak suaranya. Dalam pemilihan kepala daerah ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut.

### Grafik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pada Tahun 2018



Sumber: [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id)

#### Gambar 1. Grafik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Provinsi Papua persentase tingkat partisipasi masyarakat sebesar 89,40%. Dan dapat dikatakan ini merupakan angka partisipasi politik yang tinggi. Namun hal ini tidak menjamin bahwa di daerah setingkat kabupaten yang berada di bawahnya memiliki persentase partisipasi

setinggi ini juga. Dilihat dari data yang penulis peroleh dari Komisi Pemilihan Umum sendiri untuk wilayah Kabupaten Merauke. telah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak pada Tahun 2015 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang diikuti oleh pasangan calon Frederikus Gebze – Sularso dan Romanus Mbaraka – Sugiyanto dengan perolehan sebagai berikut :

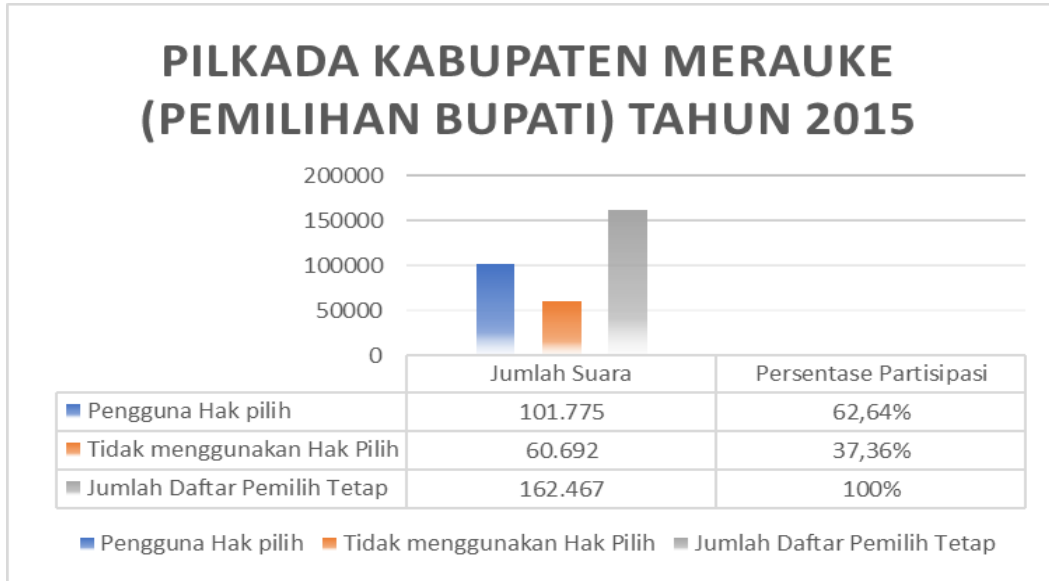
**Tabel 3. Pilkada Bupati Kabupaten Merauke Periode 2015-2020**

No.	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase Suara
1.	Frederikus Gebze – Sularso	61.574	60,50%
2.	Romanus Mbaraka – Sugiyanto	39.541	39,50%
Jumlah Pengguna Hak Pilih		101.775	
Jumlah Daftar Pemilih Tetap		162.467	

Sumber : [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id)

Pemilihan ini pun dimenangkan oleh pasangan calon Frederikus Gebze – Sularso. Dengan persentase suara sebanyak 60,50%

secara sah. Melalui pemilihan ini maka dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Merauke pada grafik berikut:



Sumber: [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id)

**Gambar 2. Grafik Pilkada Bupati Kabupaten Merauke Pada Tahun 2015**

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa masyarakat di Kabupaten Merauke masih banyak yang belum berpartisipasi aktif di politik dalam bentuk pemilihan kepala daerah. Hal ini dikarenakan masih terdapat 37,36% masyarakat yang terdaftar sebagai DPT. Akan tetapi tidak berpartisipasi di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke. Kemudian nantinya pada Tahun 2020 akan diadakan pemilihan kepala daerah serentak yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Merauke dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025.

Pemilihan kepala daerah ini akan diselenggarakan ditengah-tengah pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease*). Dengan menggunakan protokol kesehatan guna mencegah penularan virus corona yang telah menyebar dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok ke seluruh dunia sejak akhir Tahun 2019. Dengan data yang diperoleh penulis dapat dikatakan bahwa partisipasi politik masyarakat masih perlu ditingkatkan kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Terutama pada pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 ini yang menjadi tantangan tersendiri di dalam penyelenggarannya.

Pemerintah Kabupaten Merauke memiliki tugas dan tanggung jawab penting terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020. Melalui organisasi perangkat daerah dan unsur terkait, yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pesta demokrasi. Masyarakat adalah komponen penting dalam pelaksanaan pemerintahan demokrasi yang akan menentukan masa depan daerah Kabupaten Merauke. Yalvema Miaz (Miaz 2012) mengatakan bahwa :

Pemerintahan demokrasi merupakan bentuk dimana pemerintah tunduk akan persetujuan oleh masyarakat dan melaksanakan tugas serta kebijakannya sesuai dengan kehendak masyarakat. Jika kondisi demokrasi telah maju dan berkembang maka seseorang lebih memungkinkan dirinya untuk terbuka dalam berpolitik dan akan lebih berkontribusi ke dalam kegiatan politik, termasuk melakukan pemilihan dalam ajang pemilu.

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DI KABUPATEN MERAUKE

(Mulyana dan Christian Jhonfri Tambunan)

Bagian dari pemerintah daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disingkat BAKESBANGPOL serta merupakan Lembaga Teknis Daerah dengan bentuk sebagai Badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Berdasarkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tugas Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dijelaskan bahwa di dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat bidang politik yang diatur pada pasal 16 sampai 18.

Bidang politik terdiri atas dua sub bidang yaitu, Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik dan Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu. Pada pasal 17 ayat (1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik.

Pasal 17 ayat (3) huruf (d) bahwa uraian tugas Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik adalah melaksanakan penyiapan fasilitasi pembinaan dan pengawasan implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik yang ditujukan kepada masyarakat. Merujuk pada tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BAKESBANGPOL, bahwa Badan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab penting dalam usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran partisipasi politik masyarakat. Dengan memfasilitasi masyarakat agar mendapat pembinaan dan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke.

Tugas dan tanggung jawab yang penting sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan

partisipasi politik masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melakukan pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat. Yang berupa sosialisasi mengenai pentingnya berpartisipasi di dalam politik terhadap masyarakat. Kepada kalangan masyarakat cukup umur sebagai pemilih, pemilih pemula, organisasi masyarakat dan kelompok kepentingan yang ada di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dalam menciptakan pemilihan kepala daerah yang berkualitas kedepannya. Bertitik tolak dari uraian latar belakang, terlihat permasalahan yang ada terkait dengan tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Merauke yang hanya sebesar 62,64% dan masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi aktif di dalam pemilihan kepala daerah yaitu sebesar 37,36%. Melihat dari fakta empirik yang ada, maka penulis akan memfokuskan riset yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan partisipasi politik yang dilakukan masyarakat Kabupaten Merauke dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2015 hingga 2020 di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

## METODE

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan metode kualitatif lebih memahami gejala pemerintahan pada kondisi empiris sehubungan dengan partisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan pemilihan kepala daerah kabupaten. Menurut Sugiyono (2017), metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang dipakai dalam melakukan penelitian dengan kondisi objek yang alamiah. Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti. Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana penulis akan menanyakan hal-hal mengenai permasalahan penelitian demi memperoleh keterangan dan informasi yang jelas. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara semi terstruktur kepada 20 orang informan kepada:

- a) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke
- b) Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke
- c) Kepala Subbidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke
- d) Ketua KPU Kabupaten Merauke
- e) Partai Politik peserta Pilkada 2020
- f) Calon Bupati peserta Pilkada 2020
- g) Masyarakat Kabupaten Merauke yang menjadi perwakilan Distrik

Teknik analisis data yang penulis pakai dalam kegiatan riset yaitu, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), dimana ada tiga tahap dalam analisis data yaitu Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data/penarikan kesimpulan. Dalam menganalisis kajian ini, penulis menggunakan konsep partisipasi politik James Roseau dalam Efriza (2012) mengemukakan dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum antara lain:

#### 1. Gaya Partisipasi

Gaya berpatokan pada segala sesuatu tentang bagaimana cara seseorang melakukan suatu kegiatan atau apapun yang dilakukannya. Layaknya gaya berbicara yang singkat dan bertele-tele menyangkut pembicaraan politiknya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi gaya partisipasi adalah sebagai berikut:

- a. Langsung atau terwakilkan  
Keadaan dimana seseorang menyertakan diri sendiri secara aktual dan melakukan hubungan langsung dengan para figur politik melalui telepon, surat, ataupun mendatangi kantor pemerintah. Adapun yang terwakilkan mampu bertindak dengan figur politik akan tetapi tidak bersama mereka secara langsung, seperti melalui pemberian suara kepada pejabat

pemerintah yang belum pernah ditemuinya.

- b. Kentara atau tak kentara  
Dalam menyampaikan pendapat mengenai politik, dapat menaikkan *possibility* untuk mendapatkan keuntungan material. Seperti saat seseorang mendukung secara terbuka seorang peserta pemilu dan mendapat imbalan dengan diangkat agar memegang jabatan pemerintahan.
- c. Individual atau kolektif  
Sosialisasi terhadap gaya partisipasi individual lebih ditekankan pada masa kanak-kanak dan sekolah dasar. Bukannya dengan memasuki organisasi pada demonstrasi agar membuat tekanan secara kolektif terhadap pembuatan kebijakan.
- d. Sistematis atau acak  
Dalam berpartisipasi politik terdapat beberapa individu yang mencapai tujuannya bertindak dilandaskan perhitungan, perasaan, usul dan perhitungan mereka dan tidak berdasarkan dorongan hati. Hal ini membuat tindakan yang diambil mereka terus berkesinambungan dan teguh karena mereka melakukannya dengan konsisten dan tidak berkontradiksi.
- e. Terbuka atau tersembunyi  
Individu yang menyampaikan pendapat politiknya secara terang-terangan dan memakai beragam instrumen yang bisa diobservasi untuk melakukannya memiliki gaya partisipasi yang terbuka.
- f. Berkomitmen atau tak berkomitmen  
Setiap orang memiliki intensitas partisipasi yang berbeda. Orang dengan semangat serta antusias akan mendukung baik tujuan maupun kandidat dan kebijakan serta program yang diminatinya. Ini merupakan bentuk komitmen dalam partisipasi politik.
- g. Derita atau kesenangan

Penyebab individu mulai memperhatikan politik dapat dikarenakan seseorang mengikuti deritanya dengan harapan ingin mencapai hal yang lebih baik melalui partisipasinya.

## 2. Motif Partisipasi

Terdapat beragam faktor yang mampu menaikkan ataupun mengurangi partisipasi politik dari masyarakat, salah satunya adalah motif dari orang tersebut untuk terlibat dalam politik. Adapun berbagai motif yang mempengaruhi partisipasi yaitu:

### a. Sengaja atau tak sengaja

Ada masyarakat yang dengan sengaja melakukan pencarian akan informasi dengan hasrat untuk mengetahui serta melakukan pengaruh terhadap suara legislator, ataupun *directing* kebijaksanaan pejabat pemerintah.

### b. Rasional atau emosional

Motif yang dimiliki seseorang dengan teliti melakukan berbagai pertimbangan alternatif dalam pencapaian tujuannya. Dan kemudian memilih alternatif yang memiliki banyak *benefit* buatnya secara rasional.

### c. Kebutuhan psikologis atau sosial

Dalam berpartisipasi ada beberapa warga negara yang memilih dikarenakan kebutuhan psikologis untuk mendukung pemimpin politiknya akibat kebutuhan mendalam terhadap tunduknya kepada otoritas.

### d. Diarahkan dari dalam atau dari luar

Terdapat dorongan partisipasi akibat pengaruh dari dalam yaitu motivasi secara batiniah dan dari luar berupa motivasi sosial.

### e. Berpikir atau tanpa berpikir

Kesadaran tiap orang berbeda ketika melakukan tindakan politik. Ada yang berpartisipasi dengan cara berpikir panjang lebih dahulu dan ada yang langsung memilih tanpa berpikir. Interpretasi aktif yang dipikirkan merupakan suatu perilaku dari tindakan

seseorang dengan perkiraan dari konsekuensi akan tindakan yang diambilnya baik terhadap dirinya dengan orang lain.

## 3. Konsekuensi Partisipasi Seorang Dalam Politik

Jika seseorang berpartisipasi di dalam politik pasti secara tanpa disadari akan timbul pertanyaan mengenai apa konsekuensi dari partisipasi yang dilakukannya dan peran yang dilakukannya pada perpolitikan secara umum. Partisipasi sendiri mempunyai konsekuensi terhadap seseorang yang terlibat dalam politik sebagai berikut :

### a. Fungsional atau disfungsional

Tidak semua partisipasi dapat menyalurkan tujuan yang dimiliki seseorang. Seperti halnya seseorang mempunyai tujuan untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara melalui pemberian suara. Maka yang dilakukan ini adalah cara fungsional.

### b. Sinambung atau terputus

Apabila partisipasi yang dilakukan seseorang berkontribusi dalam meneruskan keadaan, kondisi, situasi, program dan pemerintahan yang telah berlaku sebelumnya. Maka konsekuensi dari partisipasi ini sinambung. Jika sebaliknya seperti merusak rutinitas dan ritualitas, mengancam kestabilan, serta mengganggu kesinambungan kekuatan politik yang ada maka partisipasi ini memiliki konsekuensi yang terputus.

### c. Mendukung atau menuntut

Konsekuensi partisipasi yang mendukung ditandai dengan terlihatnya dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam rezim politik yang ada melalui pemberian suara, mematuhi hukum, menyanyikan lagu kebangsaan, membayar pajak, serta berikrar setia kepada bendera dan lainnya. Sebaliknya konsekuensi partisipasi yang menuntut muncul dengan adanya tuntutan dari masyarakat kepada pejabat pemerintah,

pengajuan petisi, *lobbying* atau bahkan penarikan kembali dukungan dana dalam kampanye.

Dilandasi dari dimensi-dimensi atas konsep partisipasi politik masyarakat yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam partisipasi politik setiap orang turut serta melalui beragam cara. Cara-cara yang dilakukan pun dibagi dalam tiga dimensi berbeda yaitu: gaya umum partisipasi, motif partisipasi yang mejadi landasan dari tindakan yang mereka lakukan, dan konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2015 hingga 2020 di Kabupaten Merauke

Partisipasi politik yang terjadi di Kabupaten Merauke dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Tahun 2015 hingga 2020 telah mengalami perkembangan yang dapat dikatakan meningkat. Dapat dikatakan seperti

ini dikarenakan data yang penulis peroleh dari pihak KPU Kabupaten Merauke menunjukkan adanya kenaikan angka partisipasi pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025 pada tanggal 9 Desember 2020. Partisipasi pemilu pada pemilihan ini meningkat daripada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya pada Tahun 2015. Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin dilaksanakan pada saat pandemi *covid-19* yang mana mengharuskan masyarakat untuk ekstra berhati-hati saat melakukan kegiatan di luar rumah demi mencegah penyebaran virus *covid-19*. Namun hal ini bukan menjadi halangan bagi masyarakat Kabupaten Merauke dalam mengikuti pesta demokrasi yang berlangsung. Meskipun sedang berada di tengah pandemi seperti ini angka partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah cenderung meningkat. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan secara serentak ini dalam wilayah Kabupaten Merauke sendiri diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu Hendrikus Mahuse - Eddy Santosa, Heribertus Silubun - Bambang Setiadji, Dan Romanus Mbaraka - Riduwan dengan perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel 5. Pilkada Bupati Kabupaten Merauke Periode 2020-2025**

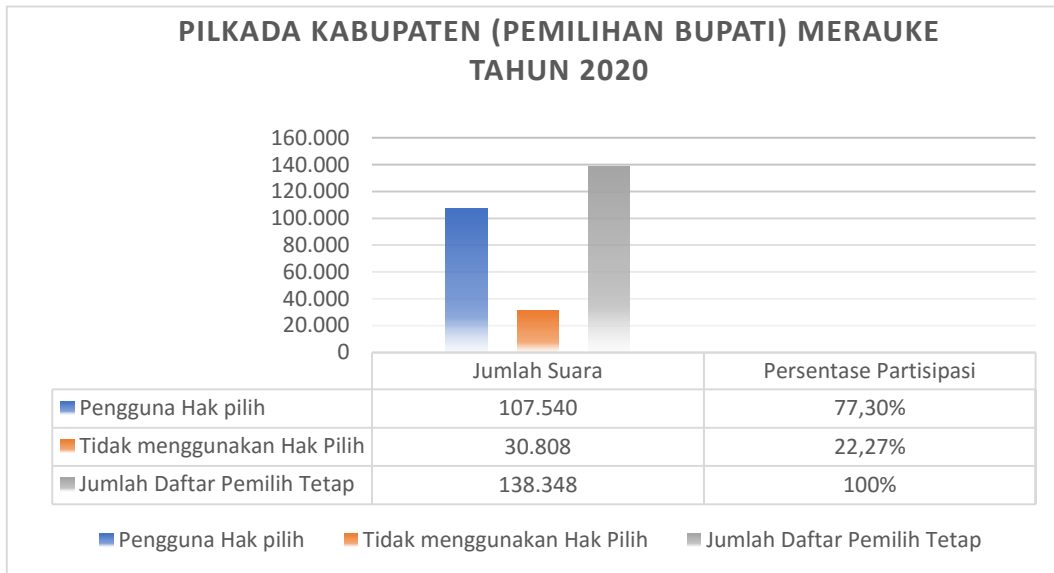
No.	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase Suara
1.	Hendrikus Mahuse - Eddy Santosa	29.858	28,14%
2.	Heribertus Silubun - Bambang Setiadji	11.599	10,93%
3.	Romanus Mbaraka - Riduwan	64.637	60,92%
Jumlah Pengguna Hak Pilih		107.540	
Jumlah Daftar Pemilih Tetap		138.348	

Sumber: KPU Kabupaten Merauke

Pemilihan Kepala Daerah ini dimenangkan oleh pasangan calon Romanus Mbaraka – Riduwan dengan persentase suara sebanyak 60,92% dengan 64.637 suara dukungan kepada mereka. Sedangkan pasangan calon yang memperoleh suara paling sedikit adalah pasangan Heribertus Silubun – Bambang Setiadji yang hanya memperoleh 11.599 suara atau hanya sebesar

10,93% suara. Namun jika dilihat jumlah pengguna hak pilih dan jumlah DPT dapat terlihat adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Melalui pemilihan ini maka dapat dilihat tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada Tahun 2020 di Kabupaten Merauke pada grafik berikut:



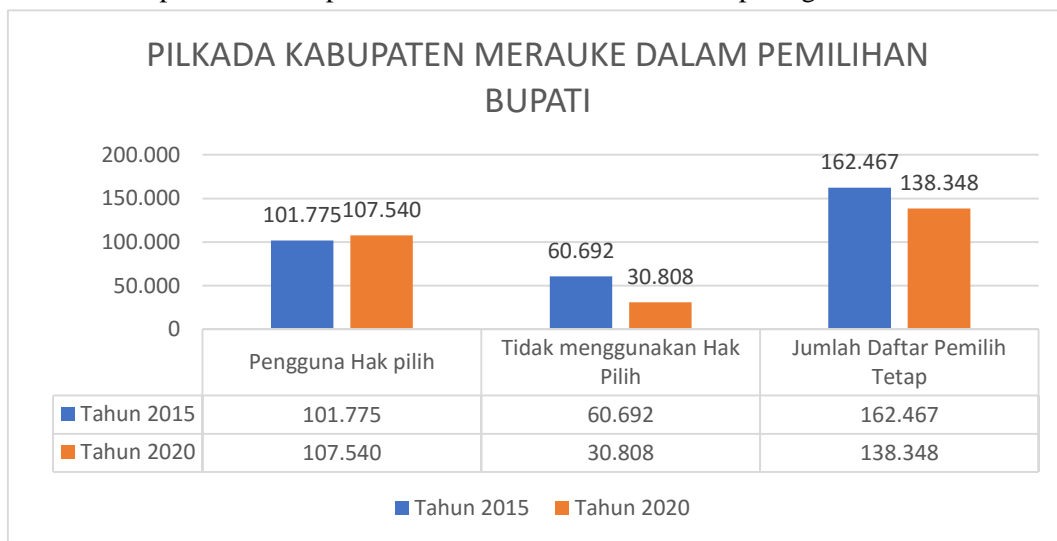


Sumber: KPU Kabupaten Merauke

**Gambar 3. Grafik Pilkada Bupati Kabupaten Merauke Pada Tahun 2020**

Grafik di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat Kabupaten Merauke mencapai angka 77,30% dengan jumlah pegguna hak pilih 107.540 suara dari 138.348 Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar mengikuti Pemilu. Pencapaian ini merupakan hal baru

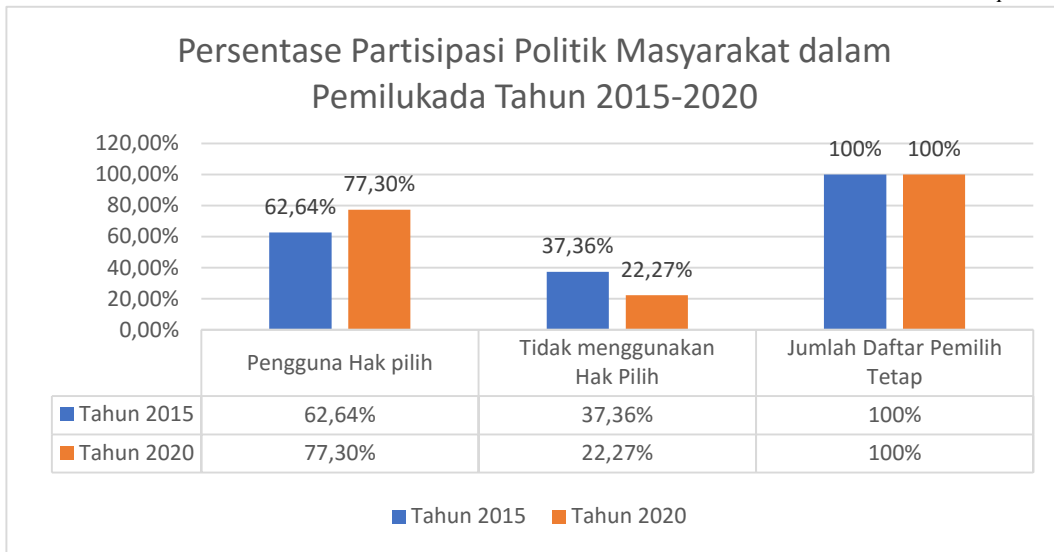
di Kabupaten Merauke, untuk pertama kalinya angka partisipasi politik masyarakat mengalami kenaikan dari Tahun-Tahun sebelumnya. Dapat dilihat perbedaannya jika dibandingkan dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2015 pada grafik berikut:



Sumber: KPU Kabupaten Merauke

**Grafik 4. Grafik Persentase Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Bupati Kabupaten Merauke**

Sumber: KPU Kabupaten Merauke



**Grafik 5. Grafik Kenaikan Persentase Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Merauke Pada Tahun 2015 – 2020**

Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan angka partisipasi politik masyarakat dalam keikutsertaan masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati yang di laksanakan dari Tahun 2015 dan 2020. Dapat dilihat juga bahwa pada Tahun 2015 memiliki persentase partisipasi dalam pemilukada sebesar 62,64% yang mengalami kenaikan pada Tahun 2020 dengan persentase partisipasi masyarakat sebesar 77,30%. Hal ini merupakan suatu capaian baru bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke dikarenakan berhasil menjalankan salah satu tugas dan fungsinya di Bidang Politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam jangka waktu 5 Tahun sehingga menghasilkan kenaikan angka persentase partisipasi politik sebesar 14,66%.

**B. Partisipasi Politik Masyarakat**

James Roseau dalam Efriza (2012) menyatakan bahwa ada tiga dimensi yang mampu mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum yaitu gaya partisipasi, motif partisipasi, dan konsekuensi partisipasi seseorang dalam politik. Analisis yang penulis lakukan sesuai

dengan data yang penulis temukan di lapangan sebagaimana uraian di bawah ini sebagai berikut:

**1. Gaya Partisipasi**

Gaya Partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum kepala daerah memiliki arti bahwa bagaimana cara yang dilakukan seseorang dalam keikutsertaannya pada suatu kegiatan sebagai bentuk dari kontribusinya. Penulis disini melakukan analisis terhadap gaya partisipasi yang dilakukan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Merauke berdasarkan data yang penulis peroleh baik melalui dokumentasi dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan narasumber. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan dengan memperhatikan gaya partisipasi yang ada di suatu daerah, sebagai bahan pertimbangan dan perencanaan dalam menyusun strategi yang tepat sasaran dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dimensi dari gaya partisipasi sendiri memiliki beberapa hal yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:

- a) Langsung atau terwakilkan

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DI KABUPATEN MERAUKE

(Mulyana dan Christian Jhonfri Tambunan)

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Merauke pada Tahun 2020 dilaksanakan secara langsung walaupun sedang berada di tengah pandemi *covid-19*. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Theresia Mahuze, SH pada tanggal 16 Januari 2021 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 kemarin itu dilaksanakan secara serentak, dan untuk sistem pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati seperti biasanya dilakukan secara langsung oleh masyarakat dan tidak diwakilkan oleh siapapun. Jadi hanya warga yang benar-benar sudah terdaftar sebagai DPT yang bisa memilih. Dan sebelum memilih pun kami ada lakukan verifikasi data dahulu yaitu pemilih harus menunjukkan KTP miliknya untuk memilih agar memastikan bahwa si pemilih ini tidak diwakili oleh siapapun”.

Selain itu penulis juga mewawancarai masyarakat yang mengikuti pemilihan kepala daerah yaitu Markus Inim yang juga menyatakan: “Saya kemarin mengikuti pemilu pada 9 desember kemarin tanpa diwakilkan. Saya sendiri yang datang ke tpsnya langsung. Dan disana juga saya diharuskan menunjukkan KTP saya sebelum memilih”.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa gaya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Merauke ini melakukan partisipasi secara langsung tanpa diwakili oleh siapapun, hal ini terlihat dari prosedur verifikasi yang dilakukan agar memastikan tidak adanya pemilih yang suaranya diwakili oleh orang lain yang memilih.

#### b) Kentara atau tak kentara

Dalam berpartisipasi politik, masyarakat dapat menunjukkan sikapnya dalam mendukung salah satu pasangan calon yang mengikuti pemilu baik secara terbuka ataupun tertutup. Di Kabupaten Merauke

masyarakat tidak banyak yang menunjukkan sikap dukungannya secara terbuka. Jikapun ada yang menunjukkan sikap dukungannya terhadap salah satu pasangan calon itu hanya masyarakat yang tergabung dalam anggota partai. Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa masyarakat Kabupaten Merauke cenderung tidak berani menunjukkan dukungannya secara terbuka dengan alasan ingin menghindari permasalahan akibat perbedaan pendapat dalam mendukung salah satu pasangan calon walaupun banyak yang seperti itu, bagi anggota partai politik mereka tetap menunjukkan dukungannya secara terbuka.

#### c) Individual atau kolektif

Partisipasi politik masyarakat dapat dilihat melalui gaya berpartisipasinya ada yang melakukannya secara individual atau secara kolektif baik melalui demonstrasi atau menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. Di Kabupaten Merauke gaya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya di dunia politik sendiri lebih mengarah kepada partisipasi secara individual sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Martinus Bayu selaku aktivis partai politik PDI-P sebagai berikut:

“Kalau soal partisipasi politik masyarakat merauke dari pandangan kami sebagai partai politik, kami lebih melihat bahwa kenyataan dilapangan masyarakat ini lebih memilih berpartisipasi secara individu dengan cara mengikuti pemilihan umum, untuk masyarakat yang bergabung secara kolektif bersama kami menjadi tim sukses paslon 02 sendiri tidak begitu banyak, begitu juga dengan paslon lain. Pokoknya jika dibandingkan antara anggota tim sukses dengan jumlah DPT, jumlah anggota tim sukses masih lebih sedikit”.

Hal serupa juga turut dikatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Theresia Mahuze, SH dengan pernyataan sebagai berikut: “Keikutsertaan masyarakat Kabupaten Merauke dalam

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DI KABUPATEN MERAUKE

(Mulyana dan Christian Jhonfri Tambunan)

politik sejauh ini masih lebih banyak yang mendukung salah satu paslon tidak secara terbuka dan masif, justru masyarakat cenderung lebih memilih berpartisipasi secara individu dengan menyalurkan suaranya”. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis mendapatkan hasil bahwa masyarakat di Kabupaten Merauke memiliki gaya partisipasi politik dengan cara yang individual.

d) Sistematis atau acak

Gaya partisipasi dipengaruhi oleh partisipasi yang sistematis atau acak merupakan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat secara sistematis dengan artian masyarakat melakukan partisipasi berdasar perhitungan, pikiran, atau usul mereka. Jika acak berarti masyarakat cenderung berpartisipasi karena dorongan dari hati mereka atau karena hal lainnya tanpa melalui pemikiran panjang. Penulis mewawancarai Markus Inim dan Ibu Natalia dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana gaya partisipasi mereka dalam pemilu pada Tahun 2020 kemarin. Markus Inim pun menjawab seperti berikut: “Saya pribadi kalau ikut pemilu seperti itu lebih berdasar pada dorongan hati saya. Karena dalam hati saya ini menginginkan adanya perubahan terhadap kabupaten saya ini dengan memilih paslon yang saya rasa mampu untuk merubah kabupaten ini kearah yang lebih baik”. Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Ibu Natalia sebagai masyarakat yang juga mengikuti pemilihan kepala daerah Tahun 2020 sebagai berikut: “Partisipasi politik saya pada pemilu kemarin ya saya ikut pemilu karena memang itu sudah kewajiban saya sebagai warga negara. Lagipula saya memilih pasangan calon yang menurut saya pantas, dengan melihat *track record* nya”. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dari segi gaya partisipasi politik yang dipengaruhi dari faktor sistematis atau acak pada masyarakat Kabupaten Merauke terbagi menjadi dua, ada masyarakat yang memiliki gaya

partisipasi yang sistematis atau tersusun secara rasional dan ada juga yang acak yang berpartisipasi karena alasan-alasan tertentu seperti dorongan dari hati nurani sendiri.

e) Terbuka atau tersembunyi

Penyampaian pendapat politik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu terbuka dengan menggunakan berbagai instrumen secara terang-terangan atau dengan cara tersembunyi. Dalam hal ini penyampaian pendapat politik masyarakat dapat dalam bentuk partisipasi dalam kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah di Kabupaten Merauke. Dengan mengidentifikasi keikutsertaan masyarakat dalam kampanye pasangan calon, dapat dilihat apakah masyarakat Kabupaten Merauke cenderung berpartisipasi politik secara terbuka atau tersembunyi. Hasil dari wawancara yang penulis lakukan memperlihatkan masyarakat Kabupaten Merauke yang mengikuti kampanye secara terbuka hanya sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT, bisa dilihat bahwa pelaksanaan kampanye dengan jumlah peserta kampanye yang dibatasi sebanyak 50-100 orang per kampanye jika dibandingkan dengan jumlah DPT sebanyak 138.348 orang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Merauke banyak yang memiliki gaya partisipasi yang tersembunyi.

f) Berkomitmen atau tak berkomitmen

Gaya Partisipasi politik memiliki salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu komitmen. Gaya partisipasi politik masyarakat dapat dikatakan aktif apabila dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan di suatu wilayah dalam lima Tahun sekali selalu diikuti oleh masyarakat secara terus-menerus, ini menunjukkan bahwa masyarakat berkomitmen dalam mengikuti pemilihan umum. Jika dilihat berdasarkan data yang penulis peroleh dari KPU baik melalui wawancara ataupun dokumentasi, memang terlihat bahwa partisipasi

masyarakat dalam pemilu ini meningkatkan serta hasil wawancara dengan Bapak Lukas selaku masyarakat juga mendukung bahwa masyarakat Kabupaten Merauke memiliki komitmen dalam berpartisipasi politik dalam pemilihan umum.

g) Derita atau kesenangan

Keikutsertaan masyarakat dalam politik terutama pada pemilihan umum dapat dilihat melalui faktor ini, apakah masyarakat ikut serta akibat derita yang selama ini masyarakat rasakan sehingga ingin merasakan adanya perubahan maka memutuskan untuk turut serta dalam politik ataukah masyarakat memiliki kesenangan tersendiri dan memang menyukai dunia perpolitikan sehingga berpartisipasi dalam politik. Di Kabupaten Merauke penulis mengambil sampel masyarakat dari beberapa orang. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Bapak Wardo yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu dan Bapak Malik yang memiliki profesi sebagai nelayan. Hasil dari wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki profesi dengan pendapatan menengah ke bawah mengikuti pemilihan umum karena dipengaruhi oleh faktor derita, disini penulis menemukan bahwa masyarakat Kabupaten Merauke menginginkan adanya perubahan yang dapat mengakhiri derita dan merubah kehidupan masyarakat itu sendiri melalui partisipasinya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Gaya partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Merauke dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti yang dikemukakan James Roseau. Penulis menemukan bahwa masyarakat Kabupaten Merauke dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, menunjukkan masyarakat dalam melakukan partisipasi politik memiliki gaya partisipasinya sendiri seperti berikut:

- a. Pemilihan yang dilakukan secara langsung tanpa diwakilkan
- b. Keikutsertaan dalam mendukung salah satu pasangan calon yang didukung secara tak kentara
- c. partisipasi pemilu yang dilakukan bersifat individual
- d. Pola pemikiran dalam memilih yang berbeda-beda, ada yang berpikir secara sistematis dan ada juga yang acak atau *random*.
- e. Bentuk dukungan yang dilakukan secara tersembunyi
- f. Memiliki komitmen dalam mengikuti pemilu
- g. Berpartisipasi disebabkan oleh derita yang dialami dengan mengharapkan adanya perubahan terhadap dirinya melalui partisipasinya.

Hasil di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Merauke memiliki gaya partisipasi yang aktif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal-hal inilah yang memungkinkan terjadinya kenaikan angka persentase partisipasi politik di Tahun 2020. Walaupun sedang berada di tengah pandemi, tidak menghalangi masyarakat untuk tetap menyalurkan suara mereka dalam pesta demokrasi tersebut. Dilihat dari berbagai faktor diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Merauke sudah mulai sadar akan politik dan pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, diketahui bahwa gaya partisipasi masyarakat cenderung memiliki tipe langsung, tidak kentara, secara tersembunyi, secara acak dan sistematis. Adapun masyarakat cenderung berpartisipasi karena faktor derita yang dialami.

## 2. Motif Partisipasi

Partisipasi politik masyarakat mempunyai berbagai faktor yang mampu untuk menaikkan ataupun menurunkan partisipasinya, selain dari gaya partisipasi masyarakat ada juga motif dari partisipasi itu sendiri. Motif partisipasi ini merupakan suatu dorongan yang mampu mempengaruhi seseorang dalam

berpartisipasi politik. Di Kabupaten Merauke yang memiliki penduduk yang heterogen, pasti memiliki beragam motif yang mempengaruhi mereka dalam berpartisipasi dalam politik, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan motif partisipasi yang dikemukakan James Roseau dalam teori partisipasi politik miliknya, motif dari partisipasi sendiri dibagi kedalam lima hal yang mempengaruhinya yaitu:

a) Sengaja atau tak sengaja

Motif partisipasi yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi adalah faktor sengaja atau tak sengaja. Sengaja atau tak sengaja memiliki pengertian bahwa motif dari seseorang melakukan partisipasinya dapat dia lakukan baik secara sengaja atau tidak sengaja. Secara sengaja seperti dengan sengaja melakukan pencarian akan informasi dengan keinginan agar dapat mengetahui serta mampu mempengaruhi legislator ataupun melakukan *directing* kebijaksanaan pejabat pemerintahan. Mempengaruhi kebijaksanaan pejabat pemerintahan dapat masyarakat lakukan salah satunya melalui partisipasi mereka dalam pemilu. Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pihak pemerintah memberikan informasi bahwa pihak pemerintah pun memiliki keterlibatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong motif partisipasi masyarakat secara sengaja melalui pendidikan yang diberikan oleh mereka. Selain itu penulis juga perlu memastikan data dari masyarakat sendiri sebagai pihak yang melaksanakan partisipasi mereka dalam pemilu Tahun 2020.

Penulis mewawancarai Markus Inim dalam partisipasinya pada pemilu pada Tahun 2020. Berdasarkan hasil yang penulis peroleh melalui wawancara, penulis dapat menarik suatu pemahaman dimana masyarakat Kabupaten Merauke beserta Pemerintah Daerah saling memiliki keterkaitan. Keterkaitan tersebut berada pada motif partisipasi yang muncul dimasyarakat yang sudah mulai sadar dan paham akan kontribusi mereka dalam pemilu. Inilah salah satu harapan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke melalui program kerja mereka.

b) Rasional atau emosional

Motif yang dimiliki oleh seseorang yang rasional dapat membuatnya menjadi teliti dalam melakukan berbagai pertimbangan dan alternatif lain dalam pencapaian tujuannya yang kemudian memilih alternatif pilihan yang memiliki banyak *benefit* untuknya. Berbeda dengan emosional, dimana seseorang memiliki pemikiran dan pertimbangan berdasarkan kondisi emosionalnya saat ia memutuskan sesuatu. Pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke penulis menganalisa berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di lokus penelitian penulis. Penulis mewawancarai masyarakat dengan menanyakan apakah mereka memilih pasangan calon kepala daerah berdasarkan rasionalitas atautkah emosional. Penulis pun mendapati beragam jawaban. Data yang penulis peroleh berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat, penulis mendapati bahwa masyarakat di

Kabupaten Merauke masih banyak yang memilih berdasarkan keterikatan hubungan emosional yang terjadi antara dirinya dan pasangan calon, baik itu hubungan kekeluargaan ataupun adanya kesamaan identitas yang dimilikinya. Penulis juga mendapati bahwa adapun orang-orang yang memang memilih secara rasional lebih sedikit jumlahnya daripada pemilih yang ikut memilih berdasarkan hubungan emosional yang dimiliki.

- c) **Kebutuhan psikologis atau sosial**  
Kebutuhan psikologis dari seseorang karena didalam pemikirannya membutuhkan sosok seorang pemimpin yang layak untuk memimpinya, dan memiliki kebutuhan yang mendalam untuk tunduk dalam otoritas. Kebutuhan sosial berarti seseorang memilih seorang pemimpin hanya sebagai tuntutan dari masyarakat sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pemimpin. Pada pemilihan umum, masyarakat Kabupaten Merauke banyak yang lebih memilih berdasarkan kebutuhan sosial mereka.

- d) **Diarahkan dari dalam atau dari luar**  
Motif Partisipasi dari seseorang juga dapat diarahkan dari dalam akibat pengaruh yang didapat seseorang secara batiniah, seperti keinginan yang menggebu-gebu, bisa juga karena rasa penasaran dan ingin memahami prosedur pemilihan umum, hal ini biasa terjadi pada partisipasi oleh pemilih pemula. Selain itu juga ada motif partisipasi yang muncul dari luar diri seseorang seperti

motivasi sosial yang memapar diri seseorang. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Partai Politik, serta Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang penting dalam menggugah motif partisipasi seseorang dari luar. Penulis telah mewawancarai Kepala Subbidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik Ezra Mangiri S.Sos yang menyatakan bahwa:

Dari kami Badan Kesbangpol, bisa dibilang selalu berusaha mempengaruhi masyarakat dari luar melalui sosialisasi pendidikan politik yang kami lakukan setiap 3 bulan sekali secara bergilir dari distrik ke distrik. Kami lakukan ini agar mampu membuka cara berpikir masyarakat dalam melihat politik sebagai kontribusi mereka secara nyata untuk menentukan masa depan mereka selama 5 Tahun kedepan.

Selain itu pihak partai politik pun saat diwawancarai oleh penulis pun mengatakan mereka juga berusaha untuk mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu akan tetapi dalam konteks yang lebih khusus yaitu untuk memilih pasangan calon yang diusung oleh partai tersebut, seperti yang dikatakan oleh Martinus Bayu sebagai anggota Partai PDI-P:

Sebagai partai politik tentunya kami juga mempunyai peran dalam mempengaruhi masyarakat agar mengikuti pemilihan umum, namun bedanya

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DI KABUPATEN MERAUKE

*(Mulyana dan Christian Jhonfri Tambunan)*

kami melakukannya hanya pada saat kampanye sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh pihak KPU tentunya. Kami melakukan kampanye kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh suara yang banyak pada pemilihan bupati.

Dari sisi Komisi Pemilihan Umum juga berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, pihak KPU juga mengungkapkan bahwa mereka juga mempunyai pengaruh dalam memicu motif partisipasi masyarakat dari luar. Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan yang penulis ajukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Theresia Mahuze, SH yang menyatakan:

Kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, selama masa sebelum diselenggarakannya pemilu, kerap kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media. Sosialisasi yang kami lakukan mulai dari pemasangan iklan yang berisikan ajakan untuk memilih di pinggir jalan, melakukan dialog interaktif secara *live* di stasiun radio RRI, menggunakan mobil milik Kominfo untuk menyebarkan ajakan untuk memilih di jalanan, dan tidak lupa juga kami memanfaatkan sosial media seperti *facebook* dan *instagram* dengan menampilkan infografis

yang berisikan ajakan untuk datang ke TPS kepada masyarakat. Kami pun sempat melakukan sosialisasi hingga ke pelosok-pelosok kabupaten seperti di Kampung Payum dan daerah-daerah lainnya.

Penulis tidak hanya mengumpulkan data dari sisi pandangan pemerintah, instansi independen, serta partai politik. Disini penulis juga mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak masyarakat. Penulis menanyakan pendapat masyarakat mengenai partisipasi yang dilakukannya apakah berdasar motif partisipasi dari dalam atau luar. Namun jawaban dari masyarakat pun beragam seperti pernyataan Bapak Lukas yang mengatakan: "Saya secara pribadi mengikuti pemilu ini karena memang kemauan saya sendiri untuk memilih bukan karena paksaan pihak tertentu, tapi ini murni keinginan saya sendiri".

Berbeda dengan pendapat Markus Inim yang penulis wawancarai, Markus sendiri memilih karena pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pernyataan Markus sendiri mengenai hal ini adalah seperti berikut:

Keikutsertaan saya dalam pemilihan Bupati kemarin, memang kemauan saya sendiri. Tapi sebelumnya saya pernah mendapatkan sosialisasi dari Badan Kesbangpol yang datang ke Distrik Kimaam tempat saya tinggal sekitar Tahun 2016, mereka datang



mensosialisasikan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Saya rasa karena itu juga makanya saya mengikuti pemilu di Tahun 2020 kemarin.

Berdasarkan hasil yang penulis peroleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber. Diketahui bahwa pada Pemilu Tahun 2020 terdapat banyak pihak terkait yang membantu untuk mendukung motif partisipasi masyarakat dari luar, melalui berbagai macam cara sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Dan hasil dari wawancara dengan masyarakat pun menunjukkan adanya pengaruh dari pihak Bakesbangpol dalam menggugah masyarakat untuk ikut memilih.

- e) Berpikir atau tanpa berpikir  
Setiap orang memiliki kesadaran yang berbeda-beda ketika melakukan tindakan politik. Ada orang yang ketika berpartisipasi harus berpikir panjang terlebih dahulu sebelum memilih dan ada juga yang langsung memilih secara spontan tanpa berpikir. Pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Merauke Tahun 2020 kemarin penulis mewawancarai masyarakat yang mengikuti pemilu. Penulis memahami dari hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwa masyarakat Kabupaten Merauke, masih banyak yang memilih berdasarkan kesamaan identitas yang dimilikinya dan ini menyebabkan masyarakat memilih tanpa berpikir terlebih dahulu.

Merujuk pada uraian di atas, kecenderungan motif partisipasi politik yang dimiliki oleh masyarakat adalah pemilihan dilakukan secara emosional, atas kebutuhan sosial serta dari dorongan luar. Motif Partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Merauke berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara dengan narasumber dan dianalisis menggunakan indikator-indikator yang dikemukakan oleh James Roseau dalam teorinya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki Motif Partisipasi sebagai berikut:

- a. Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan mulai berpartisipasi secara sengaja
- b. Masyarakat masih berpartisipasi politik karena adanya faktor emosional antara masyarakat dengan pasangan calon yang dipilihnya
- c. Masyarakat memiliki motif partisipasi dikarenakan kebutuhan sosial akan sosok pemimpin ditengah masyarakat komunal
- d. Motif Partisipasi masyarakat ada yang berasal dari dalam diri sendiri dan ada juga yang dipengaruhi dari luar seperti pengaruh dari Pendidikan Politik yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- e. Masyarakat masih memilih tanpa berpikir, dalam artian banyak yang memilih tanpa melihat seluk beluk dari pasangan calon kepala daerah.

### 3. Konsekuensi Partisipasi Seseorang Dalam Politik

Partisipasi yang dilakukan seseorang dalam politik secara tidak disadari akan menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi dari partisipasi yang dilakukannya

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DI KABUPATEN MERAUKE

(Mulyana dan Christian Jhonfri Tambunan)

serta peran yang dilakukannya pada dunia perpolitikan secara umum. Penulis menganalisis mengenai konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Merauke pada keterlibatan mereka dalam berpartisipasi di pemilihan kepala daerah Tahun 2020. Menurut James Roseau dalam Efriza (2012:185) partisipasi politik yang dilakukan oleh seseorang mempunyai konsekuensi terhadapnya akan keterlibatannya dalam politik, sebagaimana uraian berikut.

a) Fungsional atau disfungsional

Tidak semua partisipasi yang dilakukan masyarakat dapat menyalurkan tujuan yang dimiliki seseorang. Dalam artian jika seseorang memilih pemimpin yang didukungnya namun tidak menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan tujuan seseorang dalam memilihnya tadi maka itu akan menimbulkan konsekuensi yang disfungsional bagi pemilih. Sebaliknya jika sesuai dengan tujuan pemilih maka itu dikatakan fungsional. Untuk mengetahui konsekuensi yang terjadi di masyarakat Kabupaten Merauke, penulis telah melakukan wawancara kepada masyarakat. Penulis mewawancarai Bapak Lukas dan Ibu Siti sebagai masyarakat yang pernah mengikuti pemilihan kepala daerah di Tahun 2015 dengan periode Tahun 2015-2020. Hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa sampel masyarakat, banyak yang mengatakan bahwa pada pemilu Tahun 2015 lalu banyak mengakibatkan konsekuensi yang disfungsional kepada masyarakat peserta pemilih, baik itu pasangan calon yang menang pemilu ataupun bukan. Masyarakat peserta pemilihan kepala daerah pada Tahun 2015 lebih merasakan

ketidaksesuaian atas tujuan mereka ikut memilih dengan hasil yang mereka dapatkan selama periode Tahun 2015-2020.

b) Sinambung atau terputus

Konsekuensi yang diterima masyarakat dapat dikatakan sinambung apabila partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan hasil perolehan suara yang menunjukkan pemimpin yang dapat memimpin pada periode berikutnya tetap meneruskan keadaan, kondisi, situasi, program dan pemerintahan yang telah berlaku sebelumnya. Jika yang terjadi sebaliknya maka dikatakan terputus, seperti timbulnya kerusakan rutinitas dan ritualitas yang telah ada sebelumnya, mengancam kestabilan, serta mengganggu kesinambungan kekuatan politik yang ada. Untuk mengetahui hal tersebut di Kabupaten Merauke, penulis mewawancarai Drs. Ramadayanto, MM selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tidak hanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang penulis wawancarai. Akan tetapi unsur masyarakat juga penulis wawancarai, karena masyarakat merupakan unsur yang memegang kedaulatan dan memilih untuk menyerahkan urusan pemerintahan kepada kapala daerah yang masyarakat pilih. Dapat ditarik suatu pemahaman berdasarkan hasil wawancara, bahwa konsekuensi yang diterima masyarakat terhadap pemilu Tahun 2020 adalah konsekuensi yang terputus. Dimana terjadi perubahan kepemimpinan dari bupati lama ke bupati baru. Perubahan yang terjadi

mempengaruhi baik dari tatanan pemerintahan, kondisi sosial masyarakat, serta memutus kekuatan politik sebelumnya.

- c) Mendukung atau menuntut Partisipasi politik seseorang dalam pemilu mempunyai konsekuensi yang dapat dikatakan mendukung ditandai dengan terlihatnya dari banyaknya dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam rezim politik yang ada melalui pemberian suara. Sebaliknya jika yang muncul adalah tuntutan masyarakat kepada pejabat pemerintah, pengajuan petisi, atau bahkan penarikan kembali dukungan dana dalam kampanye. Masyarakat juga mengakui bahwa dalam pemerintahan terakhir yaitu pada periode 2015-2020, lebih banyak tuntutan yang muncul terhadap pemerintahan pada periode tersebut. Bentuk konsekuensi yang muncul dari masyarakat Kabupaten Merauke merupakan tuntutan kepada kepemimpinan Bupati pada periode 2015-2020 dan inilah yang menyebabkan terjadinya peralihan kepemimpinan kepada Bupati baru terpilih pada Tahun 2020. Masyarakat memilih menaruh harapan baru kepada Bupati Romanus Mbaraka yang terpilih. Dengan harapan dapat memajukan dan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat kedepannya.

Konsekuensi Partisipasi seseorang dalam politik yang terjadi di Kabupaten Merauke berdasarkan hasil analisis dari data yang penulis peroleh dalam wawancara. Menunjukkan bahwa masyarakat menerima konsekuensi mereka dalam berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang pernah di selenggarakan di Kabupaten Merauke baik pada

Tahun 2015 dan 2020 memperlihatkan sebagai berikut:

- a. Pemilu Tahun 2015 yang diikuti masyarakat mempunyai dampak konsekuensi yang disfungsi karena banyak masyarakat yang mengeluh selama Tahun 2015-2020 banyak yang tidak sesuai dengan tujuan masyarakat.
- b. Konsekuensi berikut yang diterima masyarakat adalah konsekuensi yang terputus, dimana terjadi perubahan baik dari tatanan pemerintahan, kehidupan sosial, dan kekuatan politik yang ada.
- c. Periode kepemimpinan pada Tahun 2015-2020 menghasilkan konsekuensi yang berupa tuntutan dari masyarakat akan kinerja yang dilakukan pejabat pemerintahan pada masa itu.

### C. Diskusi

Program pendidikan politik masyarakat yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan secara konsisten memiliki pengaruh terhadap kenaikan partisipasi politik masyarakat, berdasar hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat pengakuan beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa mereka berpartisipasi pemilu karena pernah mendapatkan sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini berbeda dengan temuan Sa'ban, Sadat dan Nastia (2019), bahwa masyarakat berpartisipasi akibat rangsangan politik dari media massa, karena pada zaman modern seperti ini media massa merupakan sarana informasi yang sangat mudah sekali diakses oleh masyarakat, dan dari ini masyarakat dapat mengetahui informasi dan mengenal 13 siapa saja calon Wali Kota dan

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DI KABUPATEN MERAUKE

(Mulyana dan Christian Jhonfri Tambunan)

Wakil Walikota. Kemudian faktor karakteristik pribadi, pendidikan agama yang diberikan sejak dini besar sekali pengaruhnya terhadap masyarakat untuk ikut berpartisipasi politik karena masyarakat Kota BauBau sangat kental dengan pendidikan agamanya maka masyarakat lebih condong untuk memilih pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota yang dapat menjaga amanah dan dapat bertanggung jawab untuk memimpin Kota BauBau. Dan yang faktor terakhir menurut mereka keadaan politik apabila suatu daerah keadaan politiknya tidak mengalami tekanan dari dalam maupun luar, masyarakat akan lebih merasa bebas dan akan mempunyai keinginan dan kesadaran untuk mengikuti partisipasi politik. Penelitian berikutnya yang senada juga menjelaskan bahwa dalam memengaruhi partisipasi politik berasal dari faktor kesadaran politik masyarakat yang merasakan bahwa memberikan hak pilih warga negara Indonesia adalah suatu kewajiban. Selain itu media massa berpengaruh signifikan terutama bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi dan kritis (Singestecia, Handoyo, and Isdaryanto 2018). Penelitian berikutnya menemukan bahwa dalam melakukan sosialisasi politik juga bisa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dimana BPD berperan dalam menyampaikan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan kegiatan pemilu sehingga dapat membantu peningkatan partisipasi politik masyarakat (Kusmanto 2013).

Sedangkan hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa masyarakat di Kabupaten Merauke sendiri sebagian besar terpengaruh melalui sosialisasi dan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik, KPU, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Gaya partisipasi masyarakat cenderung memiliki tipe langsung, tidak kentara, secara tersembunyi, secara acak dan sistematis. Adapun masyarakat cenderung berpartisipasi karena faktor derita yang dialami. Selain itu, kecenderungan motif partisipasi politik yang dimiliki oleh masyarakat adalah pemilihan

dilakukan secara emosional, atas kebutuhan sosial serta dari dorongan luar.

Proses sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan di Kabupaten Merauke agar dapat mempengaruhi partisipasi politik yaitu melalui terjun langsung ke masyarakat. Karakteristik masyarakat Kabupaten Merauke yang beragam mempengaruhi partisipasi politik seperti tingkat pendidikan yang dienyam masyarakat. Masyarakat Kabupaten Merauke bukanlah tipe masyarakat yang mudah terpengaruh oleh keadaan politik, akan tetapi lebih memilih menunjukkan suaranya dalam diam melalui pemilukada.

Peran dari Partai Politik dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah mampu melahirkan kandidat yang berkualitas dimana kandidat tersebut yang nantinya dapat menjadi calon pemimpin yang kompeten dan dapat bertahan atau berjuang dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi negara Indonesia (Natalia 2015). Berikutnya, masyarakat pun memiliki harapan yang tinggi terkait dengan peran dari partai politik yang ada, dimana partai politik berfungsi dalam melakukan sosialisasi tentang calon kepala daerah, memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mau berpartisipasi memilih, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar dapat memilih calon pemimpin yang amanah dan jujur, serta berperan dalam melakukan pencegahan konflik yang akan terjadi dalam kegiatan pemilukada (Turnip, Suntoro, and Nurmalisa 2016). Partai politik dapat melakukan pendidikan politik melalui musyawarah cabang dan anak ranting serta bersama masyarakat. Kegiatan bersama masyarakat dapat melalui pembuatan *event/acara* yang didalamnya membahas materi terkait pendidikan politik, dan/atau dengan terjun langsung kepada masyarakat dengan mengunjungi masyarakat, memperkenalkan diri dan mengajak masyarakat berdiskusi terkait permasalahan bangsa dan/atau kebutuhan masyarakat saat ini (Ariestino and Kusriyah 2017)

Peran dari KPU dinilai efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam meminimalisir angka golput dalam penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU melalui mengajak masyarakat untuk datang langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menghimbau masyarakat dalam menyelenggarakan ketertiban dan kelancaran proses pemilu tersebut (Djuyandi 2014). Tidak hanya itu, KPU juga dapat menyusun strategi dalam menyelenggarakan sosialisasi politik secara sistematis. Sebagaimana temuan (Ardiani, Kartini, and Herdiansyah 2019) menunjukkan bahwa terdapat strategi menyerang, strategi bujukan strategi penguatan oleh KPU dalam menyelenggarakan sosialisasi politik di Kabupaten Ngawi terutama dalam menargetkan sasaran pemilih pemula. Sejalan dengan itu, Yusuf A.R (2010) juga menyebutkan bahwa KPU dapat melakukan sosialisasi melalui media masa dengan melakukan simulasi pemungutan suara sehingga masyarakat dapat mengetahui tahapan dalam kegiatan pemilu nantinya. Dengan demikian, KPU memiliki peran strategis dalam menyukseskan peningkatan pendidikan politik, partisipasi pemilih serta melakukan pengawasan terhadap pemilu yang terselenggara (Nugroho and Sukmariningsih 2020). Peran dari KPU tersebut dapat terselenggara efektif apabila memperoleh dukungan dan antusiasme dari masyarakat (Purnawati and Fajar 2020). Selain itu penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara sosialisasi politik dengan partisipasi politik (Nababan, Jekrina, and Purba 2019). Dengan demikian sosialisasi politik yang telah dilakukan oleh partai politik, KPU dan Bakesbangpol Kabupaten Merauke perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui media penyebarluasan informasi yang lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi politik melalui pemanfaatan platform media sosial (Mursyid and Larissa 2021).

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya bisa dilakukan dalam beberapa sampel distrik yang bisa penulis datangi, dan tidak semua masyarakat yang penulis wawancarai mengikuti pemilu sehingga penulis harus mencari masyarakat yang tepat untuk menggali informasi mengenai partisipasinya dalam pemilu. Arah masa depan penelitian (*future work*). Penulis disini menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat yang terjadi di Kabupaten Merauke agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perkembangan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Merauke pada pilkada Tahun 2015 hingga 2020 mengalami kenaikan sebesar 14,66%, peningkatan ini terjadi karena masyarakat Kabupaten Merauke mulai memiliki kesadaran berpartisipasi politik dengan gaya partisipasi yang aktif. Gaya partisipasi masyarakat cenderung memiliki tipe langsung, tidak kentara, secara tersembunyi, secara acak dan sistematis. Adapun masyarakat cenderung berpartisipasi karena faktor derita yang dialami. Selain itu, kecenderungan motif partisipasi politik yang dimiliki oleh masyarakat adalah pemilihan dilakukan atas kebutuhan sosial dan dipengaruhi dari dorongan luar dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KPU dan Partai Politik pada saat kampanye. Namun masih terlihat bahwa masyarakat Kabupaten Merauke masih memiliki keterikatan emosional yang ada antara pemilih dan calon yang dipilih.

Penulis merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan media massa yang ada seperti siaran radio lokal,

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DI KABUPATEN MERAUKE

(Mulyana dan Christian Jhonfri Tambunan)

televisi lokal dan pemanfaatan media sosial yang ada saat ini. Perlu adanya kerjasama antara pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan KPU, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, hingga RT dan RW untuk menumbuhkan budaya politik dalam diri masyarakat. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Partai Politik sebagai infrastruktur politik untuk menjalankan fungsinya dalam masyarakat dan Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam penyampaian aspirasi melalui kerjasama dengan pihak Pemerintah Distrik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.R, M. Yusuf. 2010. "PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENDIDIKAN POLITIK." *GaneÇ Swara* 4(1).
- Ardiani, Dwi, Dede Sri Kartini, and Ari Ganjar Herdiansyah. 2019. "STRATEGI SOSIALISASI POLITIK OLEH KPU KABUPATEN NGAWI UNTUK MEMBENTUK PEMILIH PEMULA YANG CERDAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 DI KABUPATEN NGAWI." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 6(1). doi: <https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>.
- Ariestino, Lutter, and Sri Kusriyah. 2017. "PERAN PARTAI POLITIK DI DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM RANGKA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN INISIATIF MASYARAKAT DALAM PROSES PEMILU DI KOTA SEMARANG." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12(3).
- Djuyandi, Yusa. 2014. "EFEKTIVITAS SOSIALISASI POLITIK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM." *HUMANIORA* 5(2).
- Efriza. 2012. *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Kusmanto, Heri. 2013. "Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 1(1). doi: <https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i1.550>.
- Miaz, Yalvema. 2012. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi*. Padang: UNP PRESS.
- Mursyid, Saadillah, and Dea Larissa. 2021. "PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKIF SIYASAH SYAR'IAH." *SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH* 3(2).
- Nababan, Rosma, Uefaa Jekrina, and Alimin Purba. 2019. "HUBUNGAN SOSIALISASI POLITIK DENGAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN DAIRI KECAMATAN GUNUNG SITEMBER TAHUN 2018." *JURNAL PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN* 1(2).
- Natalia, Angga. 2015. "PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENSUKSESKAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2015." *Jurnal TAPIS* 11(1). doi: <https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.841>.
- Nugroho, Dian Ade, and Retno Mawarini Sukmariningsih. 2020. "PERANAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DALAM MEWUJUDKAN PEMILU  
YANG DEMOKRATIS.” *Jurnal  
JURISTIC* 1(01).

Purnawati, Laily, and Erik Nasrul Fajar. 2020. “PERAN KPU DALAM MENGATASI BLACK CAMPAIGN (Studi Pada Kantor KPU Kabupaten Tulungagung).” *Publiciana* 13(1). doi: <https://doi.org/10.36563/p.v13i1.204>.

Sa’ban, L. M. Azhar, Anwar Sadat, and Nastia. 2019. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4(1). doi: <http://dx.doi.org/10.24905/jip.v4i1.107>

2.

Singestecia, Regina, Eko Handoyo, and Noorocmat Isdaryanto. 2018. “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Slawi Kabupaten Tegal.” *Unnes Political Science Journal* 2(1).

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Turnip, Anna Dameria, Irawan Suntoro, and Yunisca Nurmalisa. 2016. “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH.” *JURNAL KULTUR DEMOKRASI* 4(3).



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).